

Kriminalisasi Perang untuk Perdamaian Global

FENOMENA penggunaan perang sebagai sarana penyelesaian konflik antarnegara masih banyak ditemukan dalam kehidupan modern saat ini. Fakta mengerikan akibat perang seperti jutaan korban jiwa, cacat tubuh, trauma psikologis serta hancurnya sarana dan prasarana fisik, tidak membuat perang dihindari.

Fakta ini tidak mampu menghapuskan pandangan para pemimpin dunia yang beranggapan jika ingin damai bersiaplah untuk perang. Terbukti perlombaan senjata melalui pengembangan teknologi dan kecanggihan persenjataan terus terjadi. Senjata nuklir menjadi salah satu puncak pencapaian sebuah negara untuk membangun strategi pertahanan maupun perimbangan kekuatan di antara negara-negara lainnya.

Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat korban yang jatuh akibat perang lebih banyak dirasakan oleh masyarakat sipil seperti perempuan, anak-anak maupun orangtua tak berdaya. Jika di masa perang tradisional, pasukan bersenjata menargetkan kemenangan dengan menjatuhkan tentara musuh sebanyak mungkin, maka medan pertempuran era modern meliputi seluruh area wilayah yang dianggap mengancam, termasuk masyarakat sipil dan seluruh fasilitas strategisnya.

Lihatlah yang terjadi di Iraq, Afganistan, Palestina ataupun Suriah. Penggunaan senjata kimia menjadi bukti bahwa perang tidak hanya menaklukkan tentara bersenjata, namun juga menyasar kehancuran masif masyarakat sipil. PBB sebagai tumpuan harapan menghindari perang, seolah tak berdaya memaksa negara besar untuk menyelesaikan konflik di meja perundingan.

Malahan keputusan perang menjadi komoditas pemimpin negara untuk pencapaian kepentingan spesifik seperti keamanan teritorial, perluasan pengaruh dan ekonomi, ideologi, dan klaim menjunjung tinggi HAM dan demokrasi. Padahal pemimpin negara adikuasa dipilih melalui pemilu yang mereka sebut demokratis, tapi memilih jalan perang atas nama penegekan demokrasi dan HAM. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berdiam diri dan membiarkan pembantaian demi pembantaian terus terjadi?

Tun Mahathir Mohamad

Kaum Environmentalist

Menjawab pertanyaan di atas, kita bisa merujuk pada gerakan yang sudah dilakukan para *environmentalist*, sebuah gerakan sosial yang berkomitmen untuk menjaga keseimbangan kehidupan antara manusia, makhluk hidup lain, beserta lingkungan sekitarnya. Meskipun kunci keberhasilan gerakan ini terletak pada para



KR-JOKO SANTOSO

pembuat kebijakan dalam isu lingkungan, namun langkah mereka tidak terhenti. Meskipun pemerintah tidak kooperatif, seperti melakukan kampanye dan membentuk jaring-jaring transnasional untuk sama-sama menyuarakan isu lingkungan ke seluruh penjuru dunia.

Walaupun belum sukses seutuhnya, namun gerakan *environmentalist* telah berhasil membentuk jaring-jaring antara LSM dunia untuk memaksa rezim pemerintah mengakomodasi tuntutan mereka seperti masuk proses perundingan yang menangani masalah lingkungan di Rio de Janeiro atau menandatangani Protokol Kyoto. Rute perjuangan *environmentalist* tampaknya bisa menjadi referensi untuk gerakan perdamaian, anti-perang bahkan krimi-

nalisasi perang.

Gerakan Kriminalisasi Perang

Perdamaian harus dimaknai sebagai situasi tanpa perang, karena perang adalah perbuatan tidak bermoral yang menjadikan masyarakat tidak berdosa menjadi korban utamanya. Perang atas dasar apapun adalah tindakan kriminal. Siapapun pelakunya bahkan seorang presiden negara adikuasa pun harus mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai kaidah hukum internasional. Setiap pemimpin dunia harus memiliki komitmen untuk mengedepankan prinsip *struggle for peace*, sehingga perang, pembunuhan, dan kekerasan harus dihapuskan.

Jika upaya untuk mengakhiri penggunaan perang tidak menjadi komitmen utama para pemimpin negara, maka diperlukan upaya alternatif dan terus-menerus untuk mengkampanyekan kriminalisasi perang untuk perdamaian global yang dimotori oleh pihak-pihak non pemerintah. Upaya alternatif tersebut antara lain *pertama*, pemberdayaan masyarakat sipil, khususnya korban perang dan keluarganya. Mereka harus didorong menyuarakan pendapat dan pengalaman dampak perang yang merusak untuk menggambarkan kejahatan pemimpin yang memutuskan berperang dan menyeret mereka ke pengadilan internasional. Sekaligus membangkitkan kesadaran penggunaan hak pilih dalam pemilu untuk tidak memilih pemimpin yang memiliki orientasi perang.

Kedua, mendorong tumbuh kembangnya individu, LSM, ilmuwan serta akademisi yang mengkampanyekan perdamaian melalui diskusi, konferensi, kajian maupun proyek resolusi konflik dan perdamaian. *Ketiga*, media dan pengguna internet dapat menunjukkan keberpihakan kepada para korban beserta kerugian yang diderita akibat perang melalui liputan dan publikasinya.

Gerakan ini setidaknya membuka peluang dan harapan untuk mewujudkan perdamaian. Karena perang adalah tindakan kriminal dan perdamaian yang dimaknai ketiadaan perang adalah hak setiap umat manusia. □ - c

Dr Tun Mahathir Mohammad,

Perdana Menteri Malaysia 1981-2003 dan
Penerima Gelar Doktor Honoris Causa dari
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.